



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 8
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke- 1
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 Maret 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dan isu-isu Aktual
Hadir	: 1. orang dari 45 orang Anggota 2. Menteri Agama RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dan isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama RI tahun anggaran 2017 sebesar 93,78% atau sebesar Rp60.173.639.933.398,00 (*enam puluh trilyun seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp64.167.932.502.000,00 (*enam puluh empat trilyun seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengawasan, tindakan tegas, sosialisasi dan solusi terhadap persoalan yang dilakukan oleh Biro Travel Umroh yang bermasalah untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan penyelenggaraan ibadah Umroh.
 - b. Meningkatkan pengalokasian anggaran fungsi agama dan fungsi pendidikan berdasarkan kebutuhan riil di masyarakat.
 - c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pesantren dan pendirian KUA terutama daerah-daerah terdepan, tertinggal, terluar dan terdalam.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap satker-satker Kementerian Agama RI dalam rangka meningkatkan realisasi penggunaan anggaran.
 - e. Meningkatkan program-program yang terkait dalam peningkatan kualitas keimanan dan keagamaan masyarakat.
 - f. Meningkatkan kesejahteraan para penyuluh agama dan tunjangan kinerja (Tukin) guru dan dosen PNS.

- g. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap KBIH untuk peningkatan pelayanan terhadap Jemaah.
 - h. Memastikan waktu pencairan inpassing bagi guru Madrasah.
 - i. Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) dan balai diklat di daerah khusus, agar memperhatikan daerah otonomi khusus.
3. Terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang saat ini, maka Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI lebih proaktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi serta memberikan solusi tentang pentingnya kerukunan hidup umat beragama.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

Ttd.

DR. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.